

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari peran usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam kurun waktu terakhir. UMKM menjadi bidang usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain memiliki andil dalam penyediaan lapangan kerja, UMKM juga menjadi mata rantai penyebaran distribusi hasil pembangunan. Pertumbuhan jumlah UMKM yang begitu pesat yang mencapai rata-raga 4,2 persen setiap tahunnya mempunyai kontribusi lebih dari 50% dari Produk Domestic Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir (Mujiatun, S., Julita, J., Rahmayati, R., & Nainggolan, 2022).

Dalam upaya menjaga pertumbuhan UMKM sebagai pondasi perekonomian Indonesia, UMKM harus mampu berbenah dan mengikuti perkembangan situasi yang ada. UMKM yang handal dan siap dalam persaingan harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang yang memadai (Dahrani dkk., 2022). Para pelaku UMKM juga harus mampu memanfaatkan dan meningkatkan pemahaman akuntansi demi mendukung perkembangan UMKM itu sendiri. Para pelaku UMKM harus memahami penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tentu harus dibarengi dengan pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi merupakan suatu sudut pandang yang mampu melihat secara jelas bagaimana proses akuntansi sehingga menjadi sebuah laporan keuangan dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan (SAK) yang yang berlaku. Boleh jadi tingkat pemahaman seseorang akan berbeda tergantung pada tingkat Pendidikan, pelatihan dan pengalaman seseorang (Pebriantari & Andayani, 2021).

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia berlangsung sangat pesat, tidak terlepas dari perkembangan dunia teknologi informasi. Muncul dan berkembangnya beberapa perusahaan startup teknologi di Indonesia semakin

mendorong perkembangan UMKM. Sebut saja seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee dan lainnya. Saat ini untuk menjadi pelaku UMKM cukup mudah, karena tersedia marketplace yang sangat membantu bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, sehingga menjadi salah satu rangsangan tumbuhnya UMKM baru. Teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat, memberikan pilihan cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Dimana pada era informasi ini, jarak geografis tidak lagi faktor penentu dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga dunia ini menjadi suatu Kampung Global atau disebut *Global Village* (Nurasia dkk., 2021).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi (Gamedia Blog, 2020).

UMKM memiliki peran penting di dalam pembangunan serta perkembangan ekonomi. Peran UMKM tidak hanya dirasakan oleh negara- negara berkembang melainkan juga di negara- negara maju. Di negara maju maupun berkembang, peran UMKM sangat berarti. Karena menyerap sangat banyak tenaga kerja dibanding usaha besar. Donasi UMKM terhadap pembentukan ataupun pertumbuhan Produk Dalam Negeri Bruto (PDB) sangat besar dibanding donasi dari usaha besar. Saat ini jumlah UMKM menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat, terdapat 64,2 juta unit UMKM di Indonesia pada 2021. Terdiri dari Usaha Mikro sebanyak 63.955.369 unit, Usaha Kecil sebanyak 193.959

unit, Usaha Menengah sebanyak 44.728 unit, dan Usaha Besar sebanyak 5.550 unit (Muhamad, 2023) .

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM di Provinsi Jambi

Wilayah	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jambi	137.309	72.126	165.497	184.042
Kabupaten Kerinci	31.041	12.070	12.400	7.468
Kabupaten Merangin	3.274	3.554	4.956	6.121
Kabupaten Sarolangun	4.338	4.338	3.705	2.627
Kabupaten Batanghari	5.045	4.062	12.796	17.611
Kabupaten Muaro Jambi	1.801	1.757	42.105	41.234
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8.014	8.110	8.390	8.698
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	55.753	13.220	19.046	19.046
Kabupaten Tebo	1.427	2.093	1.268	8.370
Kabupaten Bungo	3.387	3.215	3.280	3.387
Kota Jambi	11.143	10.763	47.813	50.747
Kota Sungai Penuh	8.772	8.772	9.631	9.631

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan UMKM di Provinsi Jambi dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan pesat pada tahun 2020 dan terjadi peningkatan cukup pesat pada tahun 2021 dan 2022. Dengan peningkatan UMKM di provinsi Jambi, dapat menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Jambi.

Tabel 1. 2
Jumlah UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang

Tahun	Jumlah
2021	218
2022	1684
2023	1684
2024	1825

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah kab. Tebo

Kemajuan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan mereka, khususnya dalam hal akuntabilitas keuangan. Aspek ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutannya. Namun, hambatan signifikan terhadap kemajuan mereka terletak pada ketidakstabilan Sistem Informasi Akuntansi Indonesian *Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)* Vol.2 No.2, 2024: July 1497 (SIA) mereka. Seringkali, UMKM gagal memahami pentingnya praktik pengelolaan

keuangan yang baik, sehingga menyebabkan fokus yang tidak proporsional pada keuntungan jangka pendek dibandingkan stabilitas jangka panjang. Menyadari peran penting SIA dalam memfasilitasi pengembangan UMKM sangatlah penting. Dengan menyederhanakan pelaporan keuangan, meningkatkan akurasi perhitungan, dan mengelola data secara efektif, SIA menyederhanakan kompleksitas pengelolaan UMKM. Oleh karena itu, mengabaikan pentingnya SIA dalam pengelolaan UMKM adalah hal yang patut diabaikan, karena SIA berfungsi sebagai katalisator efisiensi dan pertumbuhan operasional (Achmad Fauzi, 2024).

Penggunaan informasi akuntansi yang digunakan pelaku UMKM sangatlah berguna terhadap efektivitas ketika melakukan evaluasi guna mendeteksi perkembangan usaha, struktur modal, serta banyak informasi keuangan pada periode tertentu. Penggunaan sistem informasi akuntansi ialah sebuah perangkat yang saling terkait antara satu dengan yang lain diawali dari mengumpulkan, memproses, menyimpan serta kemudian mendistribusikan informasi yang kemungkinan mampu mendukung pengambilan keputusan serta kontrol dalam sebuah proses usaha yang berjalan. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi yang sebanding dengan standar akan mengeluarkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan yang kemudian dapat meningkatkan kinerja keuangan pada usahanya.

Sistem informasi yaitu rangkuman dari prosedur yang formal dari pengumpulan data dimana untuk memproses data menjadi informasi dengan mendistribusikan kepada para pengguna, salah satunya yaitu dari jenis informasi adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Pengguna SIA dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu pengguna eksternal dan internal yang disebut dengan SIA (Mesy Terisiana dkk., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Achmad Fauzi, 2024) menurut hasil analisis data disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mesy Terisiana dkk., 2023) penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan menurut penelitian yang di

lakukan oleh (Silvia dkk., 2022) bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Bandar Lampung. Arah negatif bisa terjadi karena pemahaman yang masih kurang terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah. Sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 2007 – 2014, realisasi penyaluran KUR melampaui target yang ditetapkan pemerintah (*KUR*, 2006).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam menambah akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan agar memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka penerapan kebijakan percepatan pengembangan zona riil serta pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan perihal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Zona Riil serta Pemberdayaan UMKM (*KUR*, 2006).

Program KUR secara formal diluncurkan bertepatan pada 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan ataupun lembaga keuangan. Dana yang disediakan berbentuk dana keperluan modal kerja dan investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM orang atau perseorangan, badan usaha serta ataupun kelompok usaha yang mempunyai usaha produktif serta

layak tetapi belum mempunyai agunan bonus ataupun layak tetapi sudah memenuhi persyaratan Bank untuk mendapatkan kredit usaha (*KUR*, 2006).

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam faktor eksternal, satu diantaranya adalah akses permodalan. Dalam hal ini mendapatkan akses permodalan merupakan bantuan yang didapat dari eksternal perusahaan kemudian dana yang didapat digunakan pelaku UMKM untuk berinovasi atau mengembangkan usahanya sehingga akses permodalan berhubungan positif terhadap keberlangsungan UMKM (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2020) menyatakan bahwa akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan UMKM di Kecamatan Buleleng. Selaras dengan pernyataan (Pebriantari & Andayani, 2021) menyatakan bahwa akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan UMKM Itu di karenakan peningkatan aspek permodalan akan mempermudah memperoleh informasi terkait pinjaman dari berbagai pihak, mampu mendapat penawaran dari lembaga keuangan untuk meningkatkan usaha, mengantisipasi hambatan dalam mengakses modal eksternal, dan tidak mempersulit pinjaman kredit usaha rakyat.

Penelitian Purwaningsih (2020) mengungkapkan bahwa akses pembiayaan yang sulit menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM dikarenakan Lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. Kebanyakan dari lembaga keuangan menganggap jaminan yang dapat diberikan oleh UMKM terutama para usaha kecil tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi yang tidak menentu serta tingginya risiko yang dapat berdampak pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial cenderung lebih memilih memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berskala besar dan berisiko rendah. Hal ini terjadi karena adanya pengendalian tingkat bunga dan pemberian pinjaman oleh perantara-perantara keuangan di kebanyakan negara yang sedang berkembang. Ketika lembaga keuangan formal atau komersial memberikan pinjaman kredit ke pengusaha kecil maka keuntungan berupa intensif yang diterima tidak besar. Hal ini karena biaya administrasi dan

prosedural yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tidak sebanding dengan nilai kredit yang diberikan.

Menurut (Lestari dkk., 2020) Kinerja keuangan menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan dilihat dari hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Pernyataan ini searah dengan yang dipaparkan oleh (Mukarromah dkk., 2020) yang mengemukakan bahwa kinerja keuangan merupakan istilah yang digunakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan entitas selama periode waktu tertentu. Kinerja ialah cerminan dari suatu kemampuan atau kekuatan perusahaan dalam mengusahakan dan mendistribusikan sumber dayanya. Kinerja keuangan adalah suatu kegiatan operasional dan investasi perusahaan dengan meningkatkan peran perantara keuangan, seperti angel investor, investor ventura dan kreditor yang dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan inovasi pasar produk (Rita & Utomo, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Fauzi, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel yang di gunakan dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengganti variabel X, yaitu literasi keuangan di ganti dengan sistem informasi akuntansi. Alasan peneliti mengganti variabel tersebut karena sistem informasi akuntansi sangat penting bagi kemajuan suatu usaha. Dengan melakukan penelitian tentang sistem informasi akuntansi, di harapkan mampu membuat pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi dalam usahanya.

Berdasarkan perbedaan hasil dan uraian latar belakang yang sebelumnya dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Akses Permodalan Terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Akses Permodalan terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang?
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang?
3. Bagaimana Pengaruh Akses Permodalan terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang sudah di jabarkan di atas, maka tujuan di laksanakan nya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Akses Permodalan terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang
3. Untuk mengetahui Pengaruh Akses Permodalan terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat sejumlah manfaat atau kegunaan pada penelitian ini yang bisa di manfaatkan, yaitu antara lain:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai ajang untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan pada dunia bisnis dan keuangan
 - b. Menggambarkan secara langsung pemahaman tentang Sistem Informasi Akuntansi secara umum
 - c. Mempelajari secara langsung kemudahan dan kesulitan Akses Permodalan yang didapat oleh UMKM
 - d. Dapat memahami bagaimana Kinerja Keuangan yang sebenarnya pada UMKM
2. Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang
 - a. Dapat memberikan gambaran tentang pentingnya Sistem Informasi Akuntansi untuk perkembangan UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang

- b. Dapat memberikan gambaran tentang pentingnya Akses Permodalan untuk perkembangan UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang
 - c. Sebagai bahan acuan mengetahui kualitas Kinerja Keuangan yang di miliki
3. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data yang di miliki oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo. Lokasi yang di pilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.